

LITERATUR REVIEW: PROBLEMATIKA SISWA, PENDIDIK & TEKNOLOGI

Sugiarti¹, Nazwa Aulia², Nur Ainun Radianti³, Sri Wahyuni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar

attisittimar@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan multidimensi yang mencakup mutu guru, pemerataan layanan, kesenjangan digital, dan ketimpangan kesempatan pendidikan. Kajian ini bertujuan menganalisis problematika pendidikan Indonesia secara integratif dengan menyoroti keterkaitan antardimensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan sumber dari laporan resmi, hasil asesmen internasional, dan artikel ilmiah terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa capaian belajar siswa masih rendah, Penempatan guru belum merata, distribusi layanan pendidikan antarwilayah belum adil dan pemanfaatan teknologi pembelajaran masih timpang. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia tidak dapat diatasi melalui kebijakan parsial, melainkan memerlukan strategi yang terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis pemerataan kualitas layanan.

Kata Kunci: Pendidikan Indonesia, Kualitas Guru, Pemerataan Pendidikan, Kesenjangan Digital, Kesempatan Pendidikan.

ABSTRACT

Education in Indonesia continues to face multidimensional challenges, including issues regarding teachers, equitable service provision, the digital divide, and disparities in educational opportunities. This study aims to analyze these educational issues in an integrative manner by highlighting the interconnections between these dimensions. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing a literature review based on official reports, international assessment results, and recent scholarly articles. The findings indicate that student learning outcomes remain low, teacher placement is uneven, the distribution of educational services across regions is inequitable, and the utilization of educational technology remains unbalanced. These findings underscore that educational challenges in Indonesia cannot be resolved through piecemeal policies; instead, they require strategies that are integrated, equitable, and grounded in the principle of equalizing service quality.

Keywords: Indonesian Education, Teacher Quality, Educational Equity, Digital Divide, Educational Opportunities.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen utama pembentukan modal manusia dan mobilitas sosial suatu bangsa. Namun demikian, sistem pendidikan Indonesia hingga pertengahan dekade 2020-an masih bergulat dengan persoalan yang belum tuntas terselesaikan meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN selama lebih dari satu dekade. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 memperlihatkan skor literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 359, turun 12 poin dari 371 pada 2018, sementara skor matematika turun dari 379 menjadi 366 dan skor sains turun dari 396 menjadi 383 (Alfaruqi & Nurwahidah, 2025). Pemerintah memang mencatat kenaikan peringkat relatif akibat penurunan skor global yang lebih tajam, namun secara absolut capaian belajar siswa Indonesia tetap berada jauh di bawah rerata negara-negara OECD (Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, 2023).

Persoalan capaian belajar tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan kualitas dan distribusi guru yang timpang, di mana daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengalami defisit guru hingga puluhan ribu orang sementara sejumlah daerah perkotaan justru mengalami surplus pada mata pelajaran tertentu (Pendidikan, 2025). Ketimpangan ini diperparah oleh kesenjangan infrastruktur teknologi: akses internet sekolah di wilayah barat Indonesia mencapai 82,1 persen sementara di wilayah timur hanya 45,2 persen, dengan indeks Gini akses teknologi pendidikan nasional sebesar 0,42 yang mengindikasikan ketimpangan tergolong tinggi (Farhatin, 2025). Pada gilirannya, seluruh kesenjangan tersebut bermuara pada kesempatan pendidikan yang tidak setara, tampak dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi kelompok pengeluaran 20 persen terbawah yang hanya 18,23 persen, kurang dari separuh APK kelompok masyarakat mampu (Anggraini et al., 2026).

Studi-studi terdahulu mengenai pendidikan Indonesia umumnya membahas satu dimensi permasalahan secara terpisah, misalnya kajian yang berfokus pada distribusi guru semata (Pendidikan, 2025), kajian kesenjangan digital di wilayah 3T (Farhatin, 2025), atau kajian capaian PISA sebagai indikator tunggal mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, 2023). Pendekatan tersebut cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang parsial dan tidak memperhitungkan bahwa persoalan siswa, pendidik, pemerataan, teknologi, dan kesempatan pendidikan sesungguhnya bekerja sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Belum banyak kajian yang secara eksplisit

menyatukan kelima dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis untuk mengidentifikasi simpul intervensi yang paling strategis. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan: (1) memetakan kondisi capaian belajar dan karakteristik siswa Indonesia terkini; (2) menganalisis persoalan kompetensi dan distribusi pendidik; (3) mengkaji tingkat pemerataan layanan pendidikan antarwilayah; (4) menelaah kesenjangan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran; (5) mengevaluasi kesetaraan kesempatan pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi; serta (6) merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat integratif berdasarkan keterkaitan antardimensi tersebut

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kesetaraan Kesempatan Pendidikan

Kajian literatur terbaru mengenai kesetaraan (equality) sebagai pilar pendidikan multikultural menegaskan bahwa kesetaraan pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai perlakuan yang sama rata, melainkan pemberian dukungan yang proporsional sesuai titik berangkat masing-masing peserta didik, sebab siswa pada dasarnya tidak memiliki titik awal belajar yang sama (Aningrum et al., 2026). Prinsip fairness semacam ini menegaskan bahwa kesetaraan pendidikan tidak cukup diukur dari kesamaan akses formal terhadap sekolah, melainkan harus mempertimbangkan kesetaraan input (kualitas guru dan fasilitas), proses pembelajaran, dan dukungan afirmatif bagi kelompok yang secara struktural tertinggal. Argumen ini relevan untuk membaca konteks Indonesia, di mana APK pendidikan tinggi secara nasional telah meningkat, tetapi kesenjangannya antarkelompok pengeluaran tetap lebar (Anggraini et al., 2026).

Sejalan dengan itu, kajian penerapan pedagogi kritis Paulo Freire dalam konteks Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa pendidikan yang bermutu semestinya membiasakan peserta didik berpikir secara terbuka dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi, bukan menjejali peserta didik dengan materi hafalan layaknya pendidikan ‘gaya bank’ yang menempatkan peserta didik sekadar sebagai objek. Perspektif ini relevan untuk mengkritisi pendekatan pendidikan Indonesia yang masih cenderung berorientasi hafalan dan pencapaian skor, sebagaimana disinggung pula dalam kajian tentang

kurikulum abad ke-21 yang seharusnya menitikberatkan berpikir kritis, bukan sekadar hafalan (Astuti, 2025).

2. Kualitas Guru sebagai Faktor Determinan

Kajian Institute (2023) terhadap rapor kompetensi guru sekolah dasar di Indonesia menemukan bahwa capaian kompetensi guru secara nasional masih berada pada kategori rendah ('merah'), dan berbagai upaya pemerintah untuk memperbaikinya dinilai belum tepat sasaran karena masih berorientasi pada pemenuhan syarat administratif ketimbang perbaikan praktik mengajar di kelas. Islami et al. (2025) menambahkan bahwa strategi pengembangan kompetensi profesional guru yang efektif mensyaratkan pendekatan berkelanjutan mencakup pelatihan berbasis praktik, pendampingan lapangan, dan evaluasi berkala, bukan sekadar sertifikasi administratif satu kali. Tanpa pendampingan lapangan yang konsisten, pelatihan guru cenderung tidak mengubah praktik mengajar secara substantif di dalam kelas. Temuan nasional ini sejalan dengan kajian internasional yang menegaskan bahwa pencapaian kesetaraan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas dan pemerataan distribusi guru, bukan semata peningkatan kualifikasi formal (Kawuryan et al., 2021).

Temuan ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana kualifikasi akademik guru secara nasional telah mencapai lebih dari 95 persen berjenjang S-1/D-4, tetapi kompetensi pedagogik pada aspek pelaksanaan pembelajaran (66,7 persen) dan evaluasi (75 persen) masih tertinggal dibanding aspek perencanaan (83,3 persen) (Yustiyati, 2025). Dengan kata lain, sertifikasi telah berhasil menaikkan kualifikasi formal, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan praktik mengajar di kelas, sebuah kesenjangan yang oleh Islami et al. (2025) disebut sebagai jebakan kredensialisme, sejalan dengan temuan Institute (2023) tentang rendahnya rapor kompetensi guru meskipun kualifikasi formal terus membaik.

3. Kesenjangan Digital dan Pemerataan Wilayah

Penelitian terdahulu tentang kesenjangan digital pendidikan umumnya menempatkan faktor infrastruktur sebagai penyebab utama, namun kajian yang lebih mutakhir menegaskan bahwa persoalannya bersifat multilapis: bukan hanya soal ketersediaan perangkat dan jaringan, melainkan juga kemampuan guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta literasi digital masyarakat yang masih rendah

di banyak wilayah (Farhatin, 2025). Sejalan dengan itu, laporan gabungan Bank et al., (2022) mengingatkan fenomena learning poverty, yaitu kondisi anak usia sepuluh tahun yang tidak mampu membaca dan memahami teks sederhana, yang secara global meningkat tajam dari 57 persen sebelum pandemi menjadi sekitar 70 persen pascapandemi di negara berpendapatan rendah dan menengah, sebuah fenomena yang selaras dengan temuan PISA 2022 bahwa 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar minimum (Alfaruqi & Nurwahidah, 2025).

Dibandingkan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini memosisikan diri secara berbeda dengan tidak memperlakukan kesenjangan digital, distribusi guru, dan kesempatan pendidikan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rantai sebab-akibat yang saling memperkuat satu sama lain, sebuah pendekatan yang secara eksplisit masih jarang ditemukan dalam literatur pendidikan Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat memetakan dan mensintesis pola dari data sekunder yang tersebar di berbagai sumber, bukan menghasilkan data primer baru.

1. Sumber Data

Data bersumber dari tiga kategori: (1) laporan dan basis data resmi pemerintah, meliputi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Data Pokok Pendidikan (Dapodik); (2) hasil asesmen internasional, yaitu Programme for International Student Assessment (PISA) siklus 2018 dan 2022; dan (3) artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional yang membahas pendidikan Indonesia dan diterbitkan pada rentang 2016–2026, dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data resmi (bps.go.id, kemdikbud.go.id, kemendikdasmen.go.id) dan basis data jurnal ilmiah menggunakan kata kunci pemerataan pendidikan, distribusi guru, kesenjangan digital

pendidikan, dan angka partisipasi pendidikan. Dokumen yang memenuhi kriteria inklusi memuat data kuantitatif terverifikasi dan diterbitkan oleh sumber resmi atau jurnal terindeks, kemudian diunduh dan dikodifikasi berdasarkan lima tema utama penelitian.

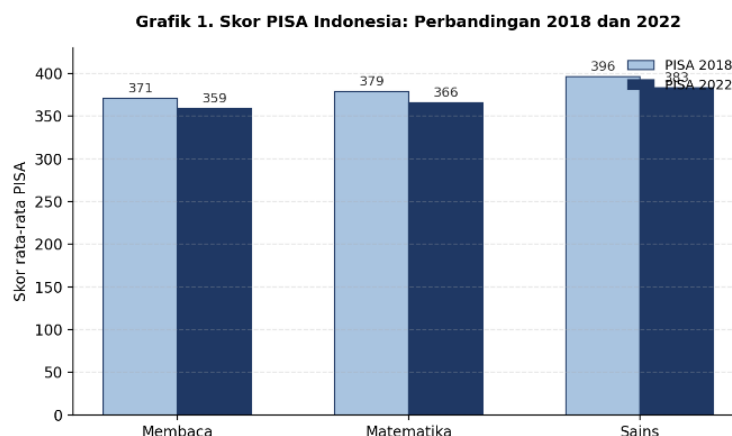
3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) mengikuti tahapan familiarisasi data, pengodean awal, pengelompokan tema, dan penarikan pola lintas tema. Setiap temuan kuantitatif ditriangulasi dengan minimal dua sumber independen untuk menjaga validitas data, mengingat sebagian data berasal dari media daring yang mengutip rilis resmi pemerintah. Pola-pola yang muncul pada kelima dimensi (siswa, pendidik, pemerataan, teknologi, kesempatan pendidikan) selanjutnya dibaca secara relasional untuk mengidentifikasi keterkaitan sebab-akibat antardimensi, bukan sekadar dipaparkan secara deskriptif parallel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Orientasi pada Siswa: Capaian Belajar yang Stagnan

Hasil PISA 2022 menjadi indikator paling representatif untuk membaca kondisi capaian belajar siswa Indonesia. Grafik 1 menyajikan perbandingan skor tiga literasi dasar antara siklus 2018 dan 2022.



Grafik 1. Skor PISA Indonesia: Perbandingan 2018 dan 2022

Data pada Grafik 1 menunjukkan penurunan konsisten pada ketiga literasi dasar. Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar penurunan skor rata-rata, melainkan proporsi siswa yang tidak mencapai kompetensi minimum: 75 persen anak usia 15 tahun berada di

bawah level 2 PISA untuk literasi membaca dan 82 persen berada di bawah level 2 untuk numerasi, sementara hanya sekitar 18 persen siswa yang mencapai kecakapan numerasi minimum sesuai standar PISA (Alfaruqi & Nurwahidah, 2025). Artinya, mayoritas siswa Indonesia usia 15 tahun kesulitan memahami gagasan utama dari teks yang relatif panjang dan kesulitan mengaplikasikan konsep matematis dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek berargumen bahwa penurunan skor 2022 mencerminkan dampak penutupan sekolah selama hampir 24 bulan akibat pandemi Covid-19 dan bukan cerminan kualitas pendidikan saat ini (Alfaruqi & Nurwahidah, 2025). Argumen tersebut secara statistik dapat dipertanggungjawabkan karena penurunan skor Indonesia (12–13 poin) relatif lebih rendah dibanding penurunan rata-rata global, sehingga peringkat relatif Indonesia justru naik lima hingga enam posisi (Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, 2023). Namun demikian, argumen kenaikan peringkat relatif ini berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar: skor absolut Indonesia tetap jauh di bawah standar kompetensi minimum OECD, dan tren jangka panjang sejak 2001 menunjukkan skor numerasi Indonesia hanya naik lima poin dalam kurun dua puluh tahun (Alfaruqi & Nurwahidah, 2025). *Learning loss* akibat pandemi karenanya lebih tepat dibaca sebagai akselerator, bukan penyebab tunggal, dari persoalan struktural yang sudah ada sebelumnya.

Dari perspektif pedagogi kritis Freire yang dibaca ulang dalam konteks Kurikulum Merdeka, stagnasi capaian belajar ini turut berkorelasi dengan orientasi pembelajaran yang masih menekankan hafalan ketimbang pemikiran kritis dan kreativitas, dua kompetensi yang justru menjadi fokus penilaian PISA (Astuti, 2025). Implikasinya, perbaikan capaian siswa tidak dapat dilakukan semata melalui penambahan jam pelajaran atau *drilling* soal, melainkan memerlukan transformasi paradigma pembelajaran menuju pendekatan yang berpusat pada pemahaman konseptual.

2) Orientasi pada Pendidik: Kompetensi dan Distribusi yang Timpang

Kualitas guru masih menjadi faktor penentu utama mutu pendidikan di Indonesia. Temuan terbaru menunjukkan bahwa banyak guru telah memenuhi kualifikasi akademik formal, tetapi tantangan terbesar justru berada pada penerjemahan kualifikasi tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang efektif, terutama pada aspek diferensiasi pembelajaran, asesmen, dan pemanfaatan teknologi. Dengan kata lain, peningkatan sertifikasi dan status

administratif belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kompetensi pedagogik yang nyata di kelas, sebuah kondisi yang juga tercermin dari studi implementasi Kurikulum Merdeka yang menemukan bahwa guru masih menghadapi kesulitan dalam analisis modul, penggunaan teknologi, dan pembelajaran berbasis masalah (Safitri et al., 2025).

Temuan ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana kualifikasi akademik guru secara nasional telah melampaui 95 persen berjenjang S-1/D-4, tetapi kompetensi pedagogik pada aspek pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi masih belum merata. Kajian tentang kompetensi pedagogik guru sekolah dasar juga menegaskan bahwa guru masih membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar dapat mengelola pembelajaran secara lebih efektif dan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Karena itu, penguatan mutu guru tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan kualifikasi formal, tetapi harus diarahkan pada pendampingan praktik mengajar, supervisi akademik, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan (Dewi et al., 2025).

3) Pemerataan Pendidikan Antarwilayah

Pemerataan pendidikan antarwilayah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang nyata. Salah satu masalah utama terletak pada distribusi guru yang belum seimbang, sehingga wilayah tertentu, terutama daerah 3T, mengalami kekurangan tenaga pendidik, sementara daerah perkotaan relatif lebih mudah memenuhi kebutuhan guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sekolah, tetapi juga oleh ketersediaan guru yang kompeten dan merata di setiap wilayah.

Temuan tersebut sejalan dengan studi tentang ketimpangan akses pendidikan perkotaan dan perdesaan yang menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah masih menghambat pencapaian SDG 4 di Indonesia. Dalam praktiknya, pemerataan pendidikan perlu dipahami sebagai distribusi sumber daya, layanan, dan dukungan pembelajaran yang adil, bukan sekadar pemerataan jumlah sekolah. Karena itu, kebijakan afirmatif harus diarahkan pada wilayah tertinggal melalui insentif guru, perbaikan fasilitas, dan penguatan layanan pendidikan dasar agar kesenjangan antardaerah tidak terus berulang (Nouvan, 2026).

4) Teknologi dalam Pembelajaran: Peluang yang Timpang

Kesenjangan digital menjadi salah satu wajah baru ketimpangan pendidikan di Indonesia. Data dan kajian terbaru menunjukkan bahwa akses internet, perangkat digital, dan kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran masih berbeda tajam antarwilayah, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan ini membuat digitalisasi pendidikan belum dapat dinikmati secara setara oleh seluruh peserta didik, sehingga sekolah dengan infrastruktur lebih baik memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding sekolah lain.

Masalah tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pedagogis. Penelitian tentang implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, terutama ketika harus mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan pendekatan berbasis masalah. Dengan demikian, kesenjangan digital harus diatasi melalui dua jalur sekaligus, yaitu pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital guru. Tanpa kedua aspek itu, teknologi justru berisiko memperlebar ketimpangan mutu pembelajaran antarwilayah (Dewi et al., 2025).

5) Kesempatan Pendidikan: Ketimpangan yang Berlapis

Kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Meskipun akses pendidikan terus mengalami peningkatan, peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi kelompok masyarakat dengan pengeluaran 20 persen terbawah hanya mencapai 18,23%, jauh lebih rendah dibandingkan kelompok 20 persen teratas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas (Anggraini et al., 2026). Selain itu, ketimpangan kesempatan pendidikan juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas layanan pendidikan di sejumlah daerah, seperti keterbatasan guru yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang belum memadai, serta akses terhadap teknologi yang belum merata.

Konsep kesetaraan pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai pemberian layanan yang sama kepada seluruh peserta didik (equality), tetapi lebih menekankan pada pemberian

dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik (equity) agar setiap individu memiliki peluang yang setara untuk berhasil dalam pendidikan (Aningrum et al., 2026). Oleh karena itu, peningkatan kesempatan pendidikan perlu dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang terintegrasi, seperti perluasan beasiswa bagi kelompok kurang mampu, pemerataan distribusi guru berkualitas, penguatan infrastruktur pendidikan dan teknologi di daerah 3T, serta penyediaan layanan pendampingan akademik yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kesempatan pendidikan sekaligus mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia masih bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Rendahnya capaian belajar siswa, kompetensi dan distribusi guru yang belum merata, kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah, ketimpangan akses teknologi, serta perbedaan kesempatan pendidikan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut memerlukan kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya berfokus pada satu aspek. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru, penguatan infrastruktur pendidikan dan teknologi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem pendidikan Indonesia mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Saran

- 1) Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan distribusi guru, pembangunan infrastruktur pendidikan dan teknologi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

- 2) Satuan pendidikan dan pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, serta kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.
- 3) Lembaga pendidikan tinggi dan peneliti diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang mengkaji keterkaitan antara kualitas guru, pemerataan pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan kesempatan pendidikan dengan menggunakan data empiris sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
- 4) Seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, A. Z., & Nurwahidah. (2025). Reflection on Indonesia's PISA scores and the 2024 madrasah teacher competency assessment results: Challenges in enhancing teacher competence. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(1), 11–19.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v15i1.2559>
- Anggraini, E. N., Ma'wa, R. J., Suprpto, F. A., & Prabawati, I. (2026). Analisis ketimpangan akses pendidikan perkotaan dan perdesaan di Indonesia dalam mendukung SDG 4. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 1927–1936. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.673>
- Aningrum, A., Al Affa, M. N. M., & Mubin, N. (2026). Kesetaraan sebagai pilar pendidikan multikultural: Studi literatur tentang perspektif teoretis dan praktik pendidikan humanistik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 3(2), 78–88.
- Astuti, Z. T. (2025). Konsep “Merdeka Belajar” Kurikulum Merdeka dalam pedagogi kritis Paulo Freire. *Indonesian Journal of Civic and Law Studies*, 1(1), 49–59.
- Bank, W., UNICEF, UNESCO, FCDO, USAID, & Foundation, B. & M. G. (2022). *The state of global learning poverty: 2022 update*. World Bank.
- Dewi, L. A. N., Rahmawati, M., & Setiawati, C. R. (2025). Kompetensi pedagogik guru sekolah dasar dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 10(1), 65–78. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v10i1.3379>

- Farhatin, F. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494–1502.
- Institute, S. R. (2023). *Rapor kompetensi guru SD Indonesia merah, dan upaya pemerintah untuk meningkatkannya belum tepat*.
- Islami, H., Putri, F. A., & Zahrudin. (2025). Strategi pengembangan kompetensi profesional guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 8(1), 192–207.
- Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman, & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers quality and educational equality achievements in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(2), 811–830. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a>
- Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, K. (2023). *Peringkat Indonesia pada PISA 2022 naik 5–6 posisi dibanding 2018 [Siaran pers]*.
- Pendidikan, P. L. P. (2025). Jumlah guru di Indonesia ideal, tetapi tidak merata. In *Kemendikdasmen*.
- Safitri, S., Nurhasanah, Rahmatih, A. N., & Makki, M. (2025). Analisis kompetensi guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SDN 47 Cakranegara. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24566>
- Nouvan. (2026). Kualifikasi Akademik Guru di Indonesia 2025 Lampau 95%, Tren Merata di Semua Jenjang. *Dataloka.id*.
<https://dataloka.id/humaniora/6624/kualifikasi-akademik-guru-di-indonesia-2025-lampau-95-tren-merata-di-semua-jenjang/>
- Yustiyati, S. (2025). *Standar Kompetensi Guru: Evaluasi Pencapaian Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi dalam Era Transformasi Pendidikan*. 01(05).